

## PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PENGOLAHAN PERIKANAN MENUJU UMKM NAIK KELAS

Hamdani<sup>1</sup>, Desy Puspita<sup>2</sup>, Josi Farmiati<sup>3</sup>, Thasrif Murhadi<sup>4</sup>, Rahmat Arfan<sup>5</sup>, Heppy<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh  
e-mail: [hamdani@poltekkutaraja.ac.id](mailto:hamdani@poltekkutaraja.ac.id)

### Abstrak

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Aceh Besar memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun selama 10 tahun terakhir keberadaan UMKM tersebut termarginalkan oleh kebijakan perbankan dalam membuka akses permodalan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat. Data Bank Indonesia menunjukkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) pada usaha sub sektor kelautan dan perikanan mencapai 20 persen. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini penting dilakukan dalam rangka memberikan pendampingan dan advokasi kepada kelompok UMKM untuk menjembatani kesenjangan dengan perbankan. Metode PkM yang dilakukan adalah pendampingan UMKM terintegrasi dan advokasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan PkM ini yaitu peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola usaha, kemampuan membuat proposal kredit, memahami prosedur kredit dan usaha menjadi bankable.

**Kata Kunci:** UMKM, Kredit Usaha Rakyat, Pendampingan, Kelautan dan Perikanan, Aceh Besar

### Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) in the fishery product processing and marketing sector in Aceh Besar have a strategic role in supporting regional economic growth and creating jobs for the community. However, during the last 10 years the existence of these SMEs has been marginalized by banking policies in opening access to business capital through People's Business Credit. Bank Indonesia data shows that the level of Non-Performing Loans (NPL) in the marine and fisheries sub-sector business reaches 20 percent. This Community Service Activity (PkM) is important in order to provide assistance and advocacy to SMEs groups to bridge the gap with banking. The PkM method used is integrated SMEs assistance and advocacy. The results achieved from this PkM activity were increasing the capacity of business actors in managing their businesses, the ability to make credit proposals, understanding credit procedures and becoming bankable.

**Keywords:** SMEs, People's Business Credit, Assistance, Maritime and Fisheries, Aceh Besar

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan baik usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan, pemasaran hasil perikanan termasuk Koperasi memiliki peran penting dan strategis dalam tatanan perekonomian daerah maupun nasional. Industri skala rumah tangga tersebut tidak hanya menghidupkan ekonomi daerah bahkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Murhadi, 2020).

Pelaku usaha industri skala rumah tangga pada umumnya berada pada posisi lemah. (Abd. Majid et al., 2018). Aspek paling dominan yang sangat mempengaruhi kemampuan pelaku usaha UMKM pengolahan perikanan adalah permodalan atau pendanaan usaha. (Nahrudin, 2014). Oleh karena itu pemberdayaan dalam konteks penguatan pendanaan untuk industri perikanan sangat memberi manfaat bagi pelaku usaha perikanan ada kemudahan akses pendanaan yang diperoleh. (Nahrudin, 2014).

Untuk itu pemerintah perlu melakukan pemberdayaan komunitas usaha pengolahan perikanan yang saat ini berada di sepanjang pesisir Aceh Besar, sehingga lebih mampu berperan dalam

pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.

Saat ini UMKM sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi berbagai persoalan, diantaranya lemahnya manajemen/pengelolaan usaha, teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pasar dan pemasaran serta akses permodalan meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan beragam kredit program.

Menurut (Yaskun & Sugiarto, 2017) permodalan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM dan sumber permodalan yang dapat diakses dalam jumlah besar sesungguhnya bersumber dari dana perbankan. Pihak perbankan sendiri dalam berbagai kesempatan kerap mengatakan bahwa bank terbuka untuk setiap pelaku usaha yang ingin mengakses modal tanpa diskriminasi termasuk pelaku usaha pengolahan perikanan. Namun fakta menunjukkan UMKM sektor kelautan dan perikanan menghadapi kesulitan dan kendala dalam berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan dan proposal kreditnya ditolak.

Berkaitan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM pengolah perikanan untuk memfasilitasi dan mengeliminir kendala yang dihadapi UMKM dalam rangka akses kredit dari perbankan terutama bank milik negara sehingga dapat mengatasi kesenjangan kekurangan modal pengembangan usaha.

Berdasarkan penelitian (Murhadi, 2020) faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan kredit UMKM oleh pelaku usaha sektor perikanan salah satunya adalah tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi mencapai 20 persen. Padahal menurut Bank Indonesia batas toleransi NPL adalah di bawah 5 persen.

Selain itu kurangnya pemahaman pelaku usaha pengolahan perikanan terhadap pengelolaan kegiatan usaha, pengelolaan keuangan, belum ada pencatatan yang baik dan kurangnya pemahaman UMKM terhadap sistem perbankan sebagai salah satu penyedia modal usaha bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan untuk mengakses kredit (Masnita & Triyowati, 2020).

Kegiatan pendampingan ini sebagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertujuan memberikan pendampingan kepada usaha mikro dan kecil baik individu maupun kelompok sektor kelautan dan perikanan berkaitan dengan akses kredit ke lembaga keuangan bank serta mengkaji lebih dalam dan memberikan rekomendasi terutama kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terhadap pemberdayaan UMKM pengolahan perikanan agar dapat menyusun kebijakan yang tepat dan berkelanjutan dalam membina UMKM untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Hasil yang ingin dicapai adalah membantu/memfasilitasi UMKM pengolahan perikanan agar berkembang, baik itu dalam hal pencatatan, pengelolaan dan akses modal dari perbankan sehingga tergolong usaha yang *bankable* dan naik kelas. Adapun yang menjadi penerima manfaat kegiatan PkM ini adalah komunitas UMKM pengolahan perikanan yang menjalankan usahanya di Desa Pulot dan Desa Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

## METODE

Kegiatan PkM dalam penelitian ini menggunakan metode pendampingan UMKM terintegrasi dan advokasi. Menurut (Wahyudi, 2009) dalam (Sari et al., 2019), pendampingan UMKM terintegrasi adalah model pengembangan UMKM yang menitikberatkan pada upaya perbaikan sistem kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dan aspek manajerial yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan petugas penyuluh perikanan dan Konsultan Pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM maupun dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Model pendampingan terintegrasi (Wahyudi, 2019) memiliki keunggulan-keunggulan yang relevan untuk diterapkan pada kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan sasaran kegiatan. Keunggulan-keunggulan metode tersebut yakni; pendampingan bersifat proaktif dan intensif; menggunakan pendekatan praktis dan aplikatif; menekankan pada keberhasilan personal.

Sedangkan metode advokasi diterapkan untuk menghasilkan output dan dampak dari proses pendampingan terintegrasi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode advokasi dan pendampingan UMKM terintegrasi maka program pendampingan menjadi lebih terarah dan terstruktur. Kegiatan dimulai dari identifikasi masalah yang dihadapi pelaku usaha, metode

pemecahan yang diperlukan, hingga pendampingan advokasi penyelesaian. Pada kasus kelompok UMKM pengolah dan pemasaran hasil perikanan Desa Pulot dan Desa Layuen masalah yang dihadapi adalah hambatan mengakses permodalan usaha Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di lembaga keuangan bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM melakukan pendampingan dan advokasi kepada kelompok UMKM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Desa Pulot dan Desa Layeun Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar telah menghasilkan manfaat sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Memfasilitasi Akses Permodalan dengan Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank  
Membangun hubungan kelompok usaha maupun UMKM individu yang didampingi dengan pihak penyedia permodalan baik lembaga keuangan bank. Diantaranya dengan Bank BSM Cab. Banda Aceh, Bank BRI, Bank BNI maupun lembaga keuangan non bank, Dana Desa (BUMG), KUD Rahmat Banda Aceh, BQ Amanah Banda Aceh serta Koperasi LEPP-M3 Lhoknga Aceh Besar dengan menyalurkan dana CSR secara bergulir dan bergilir bahkan dengan pihak NGO atau lembaga-lembaga yang menyediakan dana hibah (*grant*) kepada UMKM. Namun demikian kegiatan PkM fokus untuk mengarahkan dan sosialisasi tentang akses modal dari bank dengan target dana KUR dan Kredit Program lainnya. Karena sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum mendapat modal dari pihak perbankan karena beberapa faktor antara lain: tidak memiliki agunan, laporan keuangan dan ijin usaha yang belum memenuhi syarat bank atau belum *bankable*.
2. Pembinaan Manejemen Usaha KUB dan UMKM perikanan.  
Untuk mendorong anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan UMKM agar dapat mengakses modal pada perbankan maka telah dilakukan pembinaan dan pengarahan agar usaha yang dijalankan sesuai kebutuhan pasar, dengan harapan apa pun usaha yang dijalankan mampu meraih keuntungan yang maksimal dengan modal yang ada sehingga UMKM tersebut setelah dibina menjadi usaha yang *bankable*. Salah satu upaya yang kita anjurkan kepada UMKM adalah mengajak mereka untuk menabung di bank sehingga mereka menjadi nasabah bank dengan demikian bank akan lebih mengenal mereka. Adapun jumlah kelompok usaha dan UMKM yang dibina dalam program PkM saat ini mencapai 20 pelaku usaha yang terdiri dari kelompok usaha dan individu.
3. Pembinaan Kapasitas KUB dan UMKM dalam manajemen keuangan.  
Pada umumnya kelompok usaha bersama (KUB) dan UMKM yang didampingi telah mampu melakukan pencatatan keuangan usaha dengan baik, sehingga sangat mempengaruhi pengelolaan modal kerja yang digunakan terutama penyusunan dan pelaksanaan *bisnis plan* yang telah dibuat.
4. Mengarahkan dan memberi Informasi kepada kelompok Usaha bersama (KUB) dan UMKM dalam upaya akses modal di perbankan.  
Meningkatnya jumlah pinjaman yang semakin besar, yang tadinya bisa mendapat pinjaman melalui Koperasi/LKM maka melalui program pendampingan PkM kelompok UMKM telah mendapatkan kredit bank serta menginformasikan aturan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perbankan. Maka dalam hal ini pendamping PkM memberikan edukasi perbankan kepada mereka. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar bekerjasama dengan Konsultan Pendamping PLUT telah melakukan kegiatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada anggota KUB perikanan tangkap, Koperasi Nelayan, Pengolah, Pedagang dan pemasar ikan di pasar induk Lambaro Kab. Aceh Besar bekerjasama dengan Bank BNI 46 dan BRI Cab. Banda Aceh.
5. Sosialisasi keberadaan KKMB kepada masyarakat, KUB dan UMKM Sektor kelautan dan perikanan.  
Hal ini penting untuk kita lakukan karena masih banyak UMKM bahkan perbankan belum mengetahui dan paham tentang peran dan fungsi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Kelautan dan Perikanan. Dengan harapan dapat terjalin kerjasama yang baik dalam akses permodalan sebagai upaya membantu UMKM.

## SIMPULAN

Hasil kegiatan PkM dan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan UMKM terutama di sektor kelautan dan perikanan masih belum maksimal diberdayakan sehingga produktivitas usaha mereka belum memenuhi skala ekonomi dari usaha yang dijalankan. Padahal UMKM perlu didorong agar mampu naik kelas dari skala mikro ke kecil kemudian ke level menengah bahkan menjadi Usaha Besar (UB). Tentu ini membutuhkan tambahan kapasitas termasuk kapasitas permodalan. Oleh karena itu kepada pelaku UMKM dan pemerintah secara khusus Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pembina di sektor ini untuk melakukan beberapa kebijakan berikut ini:

1. Mengembangkan kegiatan *Microfinance* sebagai langkah alternatif untuk memudahkan akses modal bagi UMKM SKP selain akses pada Perbankan
2. Mendorong UMKM SKP untuk melengkapi persyaratan administrasi agar bisa diterima dalam akses di Perbankan, seperti pembuatan sertipikat tanah sebagai agunan.
3. Mengoptimalkan fungsi PPBMU dalam upaya meningkatkan produktifitas usaha UMKM.
4. Mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar lebih memperhatikan kesejahteraan penyuluh terutama yang memiliki karakteristik wilayah kerja yang luas dan berat.

## SARAN

Kegiatan PkM pendampingan UMKM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun 2020 dilakukan dengan durasi waktu yang singkat. Namun ternyata telah memberikan dampak yang luas terhadap motivasi usaha UMKM. Kedepan sangat diharapkan agar perguruan tinggi bisa bekerjasama dengan mitra dari dunia usaha agar dapat melaksanakan kegiatan PkM ini secara lebih lama dan menjangkau UMKM lebih banyak lagi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Tim PkM Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja Banda Aceh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Besar dan Pemimpin Bank Indonesia kantor perwakilan Provinsi Aceh, Kepala OJK Aceh, perbankan penyalur KUR yang sudah memfasilitasi dan memberi dukungan penuh kepada kami dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Majid, M. S., Hamdani, Nasir, M., & Faisal. (2018). SMEs' credit demand and economic growth in Indonesia. *Regional Science Inquiry*.
- Masnita, Y., & Triyowati, H. (2020). *Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro ( UMi ) Melalui Keuangan Inklusi*. 4(2), 255–261.
- Murhadi, T. (2020). *Analisis Kredit UMKM di Provinsi Aceh : Analisis Empiris Vector Error Correction Model ( VECM )*. 4(2), 59–70.
- Nahrudin, Z. (2014). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARRU. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.83>
- Sari, Y. P., Farida, I., & Hetika, H. (2019). Model Pendampingan Umkm Pengolahan Hasil Laut Dengan Metode Pendekatan Pendampingan Terintegrasi. *Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 293. <https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1269>
- Yaskun, M., & Sugiarto, E. (2017). Potensi Hasil Perikanan Laut Terhadap Kesejahteraan Para Nelayan Dan Masyarakat. *Studi Manajemen Dan Bisnis*.